

## IDENTITAS JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DALAM KONTEKS MULTIKULTURAL

*Flavius Floris Andries\**

*Mohtar Maso'ed\**

*Zainal Abidin Bagir\**

### ABSTRACT

*Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) is known as a group on behalf of themselves as part of Islam adherents, however, their acceptance as part of Islam become an issue led to the creation of conflict. Although by law, their existence in citizenship context is legal, but in public service is often made difficult, due to intervention of the interest groups and affiliate with the state. Disclaimer of JAI identity of Islam by Islamist group was not limited to the theological issues, dogmatic, but it extends to the social issues and public sphere policy. It can be found through postponement case of e-ID card service for the JAI community in Manis Lor village, Jalaksana District, Kuningan regency of West Java. By using a qualitative research methods, this research aims to identify and understand the basic reasons of the e-ID card service postponement for the JAI community and find out who the actor affecting these e-ID service postponement. Through interviews with several informant from government, that is executive, and legislative, and mass organizations were influential in the regency, and own JAI community, as well as document review, it was found that the e-ID services postponement for the JAI community in Kuningan West Java, was not apart from the role of local politics, Islamic mass organizations, thus it can be concluded that ID card services postponement for JAI in Kuningan are not limited to identity issue related to theological doctrine, but also the impact of the political bargaining at the local level related to the electoral votes winnings, and other parties to the influence of Islamic mass organizations that want to maintain status quo and power. Negotiation of interests between government and mass organization to make JAI as the power object led to discrimination against JAI as minorities in obtaining their rights as citizens.*

**Kata Kunci:** *citizens, ID cards, Identity, JAI, multiculturalism*

### ABSTRAK

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikenal sebagai kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari penganut agama Islam, tetapi penerimaan mereka sebagai bagian dari Islam menjadi persoalan yang mengarah pada terciptanya konflik. Walaupun secara hukum eksistensi mereka dalam konteks kewarganegaraan legal, dalam pelayanan publik sering kali dipersulit akibat adanya intervensi kelompok yang berkepentingan dan berafiliasi dengan negara. Penolakan identitas JAI sebagai Islam oleh kelompok Islam tidak sebatas pada persoalan teologis, dogmatis, tetapi telah meluas sampai pada persoalan sosial dan kebijakan ranah publik. Hal ini dapat ditemukan melalui kasus penangguhan pelayanan e-KTP bagi komunitas JAI di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan mendasar terjadinya penangguhan

\* Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri, Ambon

pelayanan e-KTP bagi komunitas JAI dan mengetahui siapa aktor yang memengaruhi terjadinya penangguhan pelayan KTP tersebut. Melalui interview dengan beberapa narasumber, baik dari pemerintah, yakni eksekutif dan legislatif, maupun ormas-ormas yang berpengaruh di kabupaten tersebut, serta komunitas JAI sendiri dan telaah dokumen, ditemukan bahwa penangguhan pelayanan KTP bagi komunitas JAI di Kuningan JABAR, tidak terlepas dari adanya peran politik lokal, ormas Islam sehingga dapat disimpulkan bahwa penangguhan pelayanan KTP bagi JAI di Kuningan tidak sebatas pada persoalan identitas yang terkait dengan doktrin teologis, tetapi juga merupakan dampak dari adanya bargaining politik di aras lokal yang terkait kemenangan suara elektoral, dan pada pihak lain adanya pengaruh ormas Islam yang ingin mempertahankan status quo dan kekuasaan. Negosiasi kepentingan antara pemerintah dan ormas dengan menjadikan JAI sebagai objek kekuasaan menyebabkan terjadi diskriminasi terhadap JAI sebagai minoritas dalam memperoleh hak mereka sebagai warga negara.

**Keywords:** Identitas, JAI, KTP, multikulturalisme, warga negara

## PENGANTAR

Persoalan identitas agama masih relevan untuk dikaji karena satu sisi identitas menjadi penanda baik secara personal maupun kolektif dalam masyarakat. Namun, pada sisi lain identitas dapat berpeluang menciptakan konflik. Indonesia yang terdiri atas berbagai identitas memiliki peluang untuk terjadinya kontestasi identitas. Fenomena sosial berupa konflik etnis dan agama yang terjadi di akhir-akhir ini mengindikasikan bahwa identitas agama merupakan salah satu aspek yang tingkat sensitivitasnya sangat tinggi serta memiliki daya magnet untuk menarik orang terjebak dalam aksi kekerasan dan anarkis. Dalam kurun waktu dua dekade, identitas agama dan etnik dijadikan pemicu konflik dan tindakan kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia (Mas'ood, 2000; Bertrand, 2004; Mujiburachman, 2006; van Klinken, 2005, 2007; Mujib dan Rumahuru, 2010).

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai identitas, baik etnis dan agama yang menjadi persoalan serius di negara ini. Identitas agama adalah salah satu dari sekian banyak persoalan sosial kemasyarakatan yang mengundang perhatian, menelan korban dan merugikan banyak pihak. Banyak kasus konflik dan kekerasan yang dipicu dari adanya identitas yang diusik dan terusik atau terdiskriminasi. Relasi sosial masyarakat yang dibangun melalui hubungan dialektika sosial kemasyarakatan antara individu maupun kelompok semakin tereduksi akibat

tingginya sensitivitas dan fanatisme keagamaan sehingga nilai-nilai budaya masyarakat yang dianut dan menjadi warisan budaya serta alat perekat masyarakat mengalami kepunahan, sedangkan kontestasi identitas keagamaan dan etnisitas semakin menonjol menunjukkan bahwa identitas sementara berada dalam pertentangan (Becmann, 2010:16-18). Pertentangan atau kontestasi identitas yang masih hangat sampai saat ini terkait dengan persoalan identitas JAI dan Islam *mainstream*. Hewitt (2003:105; Kuiper, 2000:986) mengatakan bahwa seorang individu memosisikan diri sebagai bagian dari identitas kolektif tertentu karena merasa memiliki ikatan emosional dan nilai yang sama dengan individu atau kelompok tertentu.

Menurut Taylor (1994:75), identitas adalah pengakuan dan tampilan penting dalam ekspresi politik kekinian, khususnya di kalangan kelompok minoritas yang mencari pengakuan. Identitas tergantung pada apakah permintaan (*demand*) terhadap pengakuan ini terpenuhi atau tidak. Jika individu atau masyarakat tidak diakui oleh masyarakat secara luas, sesungguhnya mereka tinggal dalam masyarakat yang tecerminkan negatif. Sulit untuk memahami hubungan antara pengakuan identitas dan identitas sebagai sesuatu yang apa adanya karena adanya permintaan terhadap pengakuan akan identitas bersifat sangat kontekstual. Jika ada sebuah identitas yang ditolak, dapat dikatakan bahwa identitas sebagai pengakuan mempunyai sisi baik dan sisi yang buruk.